

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Ksiyanto. (2018). *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Grup.
- Andi Hamzah. (2005). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (1985). *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah. (2007). *Pemberantasan Korupsi, melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chatrina Darul Rosika dan Dessy Marliani Listianingsih. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Deni Setyawati. (2008). *KPK Pemburu Koruptor*, Yogyakarta: Cetakan I, Pustaka Timur.
- Dini Dewi Heniarti. (2017). *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, Cetakan I
- Elfi Laila Kholis. (2010). *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Cimanggis-Depok: Solusi Publishing, 2010.
- Evi Hartanti. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*, Semarang: Sinar Grafika.
- Gradios Nyoman Tio Rae. (2020). *Good Governance dan Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Saberro Inti Persada.

- Harun M. Husen. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Impasial. (2007). *Menuju Purifikasi dan Independensi Peradilan Militer: Executive Summary*, Jakarta: Impasial.
- Maidin Gultom. (2018). *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung: Refika.
- Moeljatno. (1983). *Tentang Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Murbyarto. (1980). *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan*, Jakarta: Agro Ekonomika.
- Jimly Asshiddiqie (2008) *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta. hlm. 690
- P.A.F. Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Phillipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Prodjodikoro Wirjono. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Purwanto, Wawan H. (2011). *TNI dan Tata Dunia Baru Sistem Pertahanan*, Jakarta: CMB Press, Cetakan I.
- Rahardjo, Satjipto. (2011). *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita. (2011). *Reformasi Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Rosady Ruslan. (2010). *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sajipto Raharjo. (1983). *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni.

- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*, Semarang: PT Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Siswanto Sunarno. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Soegiri. (1975). *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: CV Indra Jaya.
- Soekanto, Soerjarno. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamduji. (2012). *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (1996). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafika.
- S.R. Sianturi. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Stora Grafika.
- Sukianti. (2016). *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, Medan: CV Manhaji
- Teguh Prasetyo. (2019). *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Redaksi. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Z.A. Mochtar. (2016). *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,
Pasal 65 ayat (2)

PUTUSAN

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 14/PUU-X/2012.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022.

JURNAL

Atno dan Nanda Julian Utama. (2018). "Dari Rakyat Untuk Rakyat: Benih, Cikal-Bakal, Dan Kelahiran Tentara Indonesia 1945-1947." *Journal of Indonesian History* 7.1.

Hutahaean, A., & Indarti, E. (2020). *STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)*. Masalah-Masalah Hukum, 49(3), 314-323. Available at: <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.314-323>. Diakses pada 26 Juni 2025.

Widayati. (2018). "*Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis*". Jurnal Publikasi Ilmiah. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Van Apeldoorn. (2015). "*Kepastian Hukum dalam Hukum Perdata*", Jurnal Hukum.

Sihotang, J. (2016). *Peniadaan, Pengurangan dan Pemberatan Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Militer*. *Lex Crimen*, 5(3). Available from: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11679>. Diakses pada 25 Juni 2025.

Slamet Sarwo Edy. (2024). “Analisis Yuridiksi Kewenangan Pengadilan Dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Bersama-Sama Dengan Orang Sipil”,
Fortiori Law Journal – Fakultas Hukum,UCY, Volume 4.

ARTIKEL

Bagir Manan. (2006). *Kedudukan Penegak Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Majalah Hukum, Jakarta: Tahun XXI, Nomor 243 IKAHI.

Ajeng Putri Pratiwi. (2016). “*Peranan Jepang dalam pembentukan tentara peta sebagai cikal bakal TNI = Japans role in the formation of peta as the forerunner of Indonesian National Army.*” Makalah dan Kertas Kerja Universitas Diponegoro, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya.

Kejaksaan Republik Indonesia, “Artikel Pengkajian dan Pengembangan Sistem Peradilan Pidana Militer Dalam Konstelasi Asas *Equality Before The Law*”.

INTERNET

TNI.mil.id. “Sejarah TNI.” diakses pada 12 Maret 2025.

Jhomson Siahaan, Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, 12 Maret 2025.